

Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif *Theory of Planed Behavior*

Taofik M. Gumelar¹, Elvia R. Shauki²

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia^{1,2}
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kec. Beji. Depok, Indonesia

Abstract. *This study aims to analyze and evaluate factors that influence students' intention to take whistleblowing actions against fraud in managing the organization's funds as an effort to prevent fraud and formulating a whistleblowing method that can be applied. Students know that fraud has occurred but were unable to report due to friendship conflicts. This study seeks to fill the research gap, is looking at the phenomenon of student decision making in reporting fraud on managing student funds through the whistleblowing mechanism using Theory of Planned Behavior and incorporating moral norms into it. This study uses a qualitative case study approach. Data collection techniques are questionnaires and interviews. The analysis technique uses content and thematic analysis techniques. The results indicate that the factors that influence the intention of members of the organization in carrying out reporting actions on fraud actions in the management of organizational funds, attitude, subjective norms, perceived behavioral control are not the dominant factors, whereas moral norms are the dominant factor in the formation of student organization members' intentions to take action reporting fraud. The whistleblowing mechanism is carried out using an internal whistleblowing approach.*

Keywords: *Theory Of Planned Behavior; Attitude; Subjective Norms; Perceived Behavioural Control; Moral Norms; Intention*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa dalam melakukan tindakan *whistleblowing* atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi sebagai upaya pencegahan *fraud* tersebut dan merumuskan metode *whistleblowing* yang dapat diterapkan. Terdapat permasalahan bahwa mahasiswa mengetahui telah terjadi *fraud* tersebut namun tidak mampu melaporkan karena terbentur hubungan pertemanan. Penelitian ini berupaya untuk mengisi *research gap*, yaitu melihat fenomena pengambilan keputusan mahasiswa dalam melakukan pelaporan atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana kemahasiswaan melalui mekanisme *whistleblowing* menggunakan *Theory of Planned Behavior* dan memasukan *moral norms* ke dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *qualitative case study*. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis menggunakan teknik *content* dan *thematic analysis*. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi, yaitu *attitude*, *subjective norms*, *perceived behavioural control* tidak menjadi faktor yang dominan, sedangkan *moral norms* menjadi faktor dominan dalam pembentukan niat anggota organisasi kemahasiswaan untuk melakukan tindakan pelaporan atas tindakan *fraud*. Mekanisme *whistleblowing* dilakukan dengan pendekatan *internal whistleblowing*.

Kata Kunci: Teori Perilaku Yang Direncanakan; Sikap; Norma-norma Subyektif; Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan; Norma-norma Moral; Niat

Corresponding author. taofikmuhammadg@gmail.com

How to cite this article. Taofik M. Gumelar & Elvia R. Shauki. (2020). Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif *Theory of Planed Behavior*. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12 (1), 176-200.

History of article. Received: April 2020, Revision: Juni 2020, Published: Juni 2020

Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23963>

Copyright©2020. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Kasus *fraud* selain terjadi pada sektor pemerintah dan sektor swasta, juga merambah di dunia pendidikan, salah satunya terjadi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang merupakan organisasi publik dapat dikatakan tidak bersih dari praktik *fraud*. Korupsi pada dunia pendidikan terutama pada pendidikan tinggi sejatinya bukan hal yang baru. Indonesia Corruption Watch (ICW) (2016) telah melakukan pemantauan selama 10 tahun pada kasus korupsi di perguruan tinggi, sejak 2006 hingga 2016. Tercatat ada 37 kasus korupsi yang terdiri dari 65 pelaku yang berasal dari civitas akademika. Selain itu ICW (2016) menemukan 12 pola korupsi di perguruan tinggi.

Tidak hanya terjadi pada organisasi besar, *fraud* juga terjadi pada organisasi kecil seperti organisasi kemahasiswaan. Baik organisasi besar maupun kecil tidak akan lepas dari ancaman berupa kecurangan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat merugikan organisasi. Lazimnya, organisasi kemahasiswaan tidak memiliki sistem pengendalian internal sebaik organisasi besar lainnya. Oleh karena itu, organisasi kemahasiswaan lazimnya lebih rentan terhadap kasus *fraud*. Praktik *fraud* juga terjadi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), berdasarkan hasil penelusuran unit pers mahasiswa yang dimuat dalam majalah Isola Pos menyebutkan bahwa terdapat 4000 mata kuliah yang janggal diduga telah dilakukan manipulasi nilai mata kuliah tersebut dan diduga 124 mahasiswa terlibat (ISOLA POS, 2013). Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pengurus organisasi kemahasiswaan UPI, pengurus tersebut mengakui bahwa praktik *fraud* pada pengelolaan dana organisasi memang terjadi khususnya di organisasi kemahasiswaan.

Aksi *whistleblowing* dapat dilakukan untuk mencegah tindakan kecurangan. Aksi *whistleblowing* ini pada pelaksanaannya pelaku *whistleblowing* yang biasa disebut *whistleblower* sengaja mengungkapkan kecurangan yang dia ketahui. *Whistleblower* ini memiliki akses atas informasi-informasi tentang tindakan kecurangan yang terjadi di

dalam organisasi (Yeoh, 2014). Seorang mahasiswa yang menjadi anggota dari organisasi kemahasiswaan dapat bertindak sebagai *whistleblower*. Hal tersebut dikarenakan anggota organisasi tersebut memiliki akses atas informasi kecurangan yang terjadi di organisasi kemahasiswaan.

Mahasiswa pada umumnya mengetahui telah terjadi kecurangan pada lingkungan organisasinya. Namun mereka tidak mampu untuk menindak atau melaporkan tindak kecurangan tersebut. Hal ini dikarenakan hubungan pertemanan antar mahasiswa yang sangat dekat, sehingga muncul rasa segan untuk menindak atau melaporkan. Selain itu, adanya rasa takut dianggap sebagai pengkhianat dan dianggap tidak loyal terhadap organisasi (Fathiyah, Mufidah, & Masnun, 2019).

Fenomena *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi di lingkungan kemahasiswaan serta tidak adanya upaya pencegahan terhadap praktik *fraud* tersebut melalui penerapan *whistleblowing*, dapat digali lebih dalam melalui penelitian berbasis *Theory of Planned Behavior*. Brown, Hays, dan Stuebs Jr (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sikap dan persepsi kontrol atas *whistleblowing* berhubungan positif dengan niat *whistleblowing*. Penelitian Pamungkas, Ghozali, dan Achmad (2017) menemukan fakta bahwa *Whistleblowing System* memberikan pengaruh positif pada pencegahan *financial reporting fraud*. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap tindakan *whistleblowing* mahasiswa sebagai upaya menurunkan tingkat terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan belum dilakukan secara menyeluruh khususnya belum adanya penelitian yang menggabungkan *Theory of Planned Behavior* dan *moral norms* secara bersamaan untuk meneliti keputusan melakukan tindakan *whistleblowing* mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi *reseach gap*, yaitu melihat fenomena pengambilan keputusan mahasiswa dalam melakukan pelaporan atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana kemahasiswaan melalui

mekanisme *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan *fraud* di masa yang akan datang dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior*, memasukan *moral norms* ke dalamnya dan dianalisis lebih lanjut dengan melihat tingkat dominasi antar faktor.

Penelitian ini dimotivasi oleh pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana (1) *attitude*, (2) *subjective norms*, (3) *perceived behavioral control*, dan (4) *moral norms* anggota organisasi kemahasiswaan mengenai *whistleblowing* atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi? (5) Bagaimana intensi anggota organisasi kemahasiswaan terhadap *whistleblowing* atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi? (6) Bagaimana model *whistleblowing* yang tepat guna untuk memitigasi *fraud* pada pengelolaan dana organisasi di lingkungan organisasi kemahasiswaan?

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) pertama kali dikemukakan oleh Ajzen (1991). *Theory of Planned Behaviour* merupakan peningkatan dari *theory of reasoned action*. *Theory of reasoned action* menjelaskan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan tertentu diakibatkan oleh dua alasan, yaitu *attitude towards behavior* dan *subjective norms* (Fishbein & Ajzen, 1975). Setelah itu Ajzen (1991) menambahkan satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan tindakan yaitu *perceived behavioural control*. Maka niat seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing* tinggi, jika terdapat sikap yang mendukung dalam melakukan tindakan *whistleblowing*, mendapat dukungan dari orang sekitarnya, dan adanya persepsi kemudahan karena tidak adanya hambatan untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

Penelitian ini lebih cenderung membahas mengenai *behavior* dari individu dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Peran dari sistem institusi organisasi termasuk di dalamnya struktur organisasi *embedded* dalam faktor *perceived behavioral control*. *Institutional organization* di dalamnya

terdapat proses bisnis yang berkenaan dengan prosedur, kebijakan, otorisasi, dan wewenang di mana ini menjadi sebuah sarana dan sumber daya yang mempengaruhi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tindakan *whistleblowing*.

Attitude Towards Behavior

Attitude towards behavior merupakan kecenderungan seseorang dalam menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen I. , 1991). Ketika seseorang memiliki pandangan positif atas perbuatan, maka dia akan memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu Dalam konteks penelitian ini maka anggota organisasi kemahasiswaan akan berkeinginan untuk melakukan tindakan *whistleblowing* apabila mereka memiliki keyakinan bahwa tindakan *whistleblowing* merupakan tindakan yang menguntungkan bagi mereka, sebaliknya niat anggota organisasi akan rendah bila mereka memersepsikan melakukan tindakan *whistleblowing* akan memberikan kerugian bagi mereka.

Subjective Norms

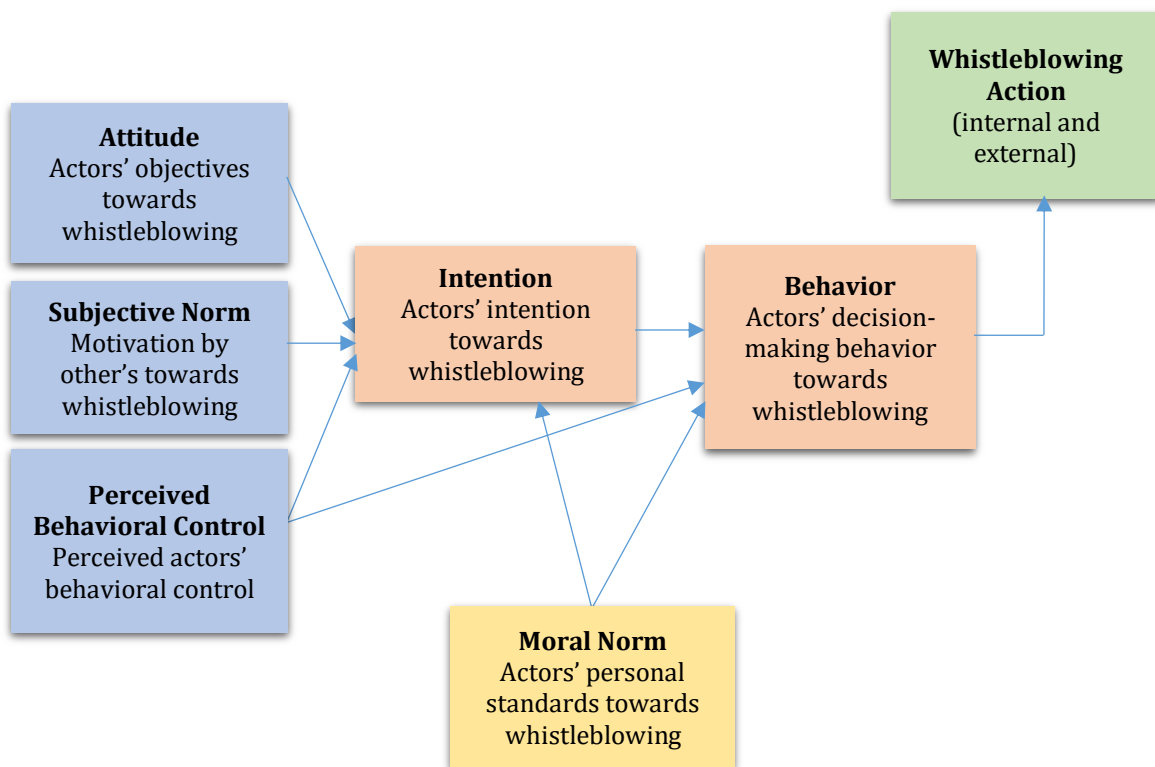
Kekuatan sosial menjadi bagian dari *subjective norms* (Fishbein & Ajzen, 1975). Pengaruh sosial yang penting dari beberapa perilaku orang terdekat seperti dari keluarga, pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja, teman dekat, dan acuan lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku (Ajzen, 2002). Saat seseorang telah dengan sadar mengetahui telah terjadi *fraud* pada pengelolaan dana organisasi di lingkungan organisasi kemahasiswaannya, di saat yang bersamaan teman-temannya mendukung dirinya untuk melakukan *whistleblowing* dan menjelaskan keuntungan yang akan diperoleh secara pribadi maupun kolektif organisasi maka hal tersebut akan mendorong orang tersebut untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

Perceived Behavioural Control

Perceived behavioural control merupakan sumber daya dan peluang yang tersedia bagi seseorang sampai batas tertentu

harus menentukan kemungkinan pencapaian perilaku (Ajzen I. , 1991). Dengan kata lain *perceived behavioural control* adalah ukuran kepercayaan seseorang mengenai seberapa sederhana atau kompleksnya melaksanakan suatu perbuatan akibat ketersediaan sumber daya dan peluang. Maka seorang anggota organisasi kemahasiswaan yang memiliki sikap yang positif atas tindakan *whistleblowing*, memiliki dukungan dari orang-orang di sekitar dan terdapat sedikit hambatan untuk melakukan perilaku tindakan *whistleblowing*, maka orang tersebut akan memiliki niatan yang lebih kuat.

disarankan untuk diteliti lebih lanjut oleh Ajzen (1991,2002). Norma-norma moral dianggap tentang persepsi seseorang atas perilaku benar dan tidak benar yang disesuaikan dengan moral pribadi dan memperhitungkan perasaan pribadi terhadap tanggung jawab untuk melakukan, atau menolak untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen I. , 1991). Pertimbangan moral anggota organisasi kemahasiswaan akan paling menonjol ketika kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain bertentangan satu sama lain. Semakin relevan situasi yang dihadapi, norma-norma moral



Sumber: Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014)

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Moral Norms

Selain ketiga faktor yang mempengaruhi niat menurut *theory of planned behavior*, dapat juga dianalisis bersama dengan *moral norms*, seperti pada penelitian Adam dan Shauki (2014) bahwa sikap, norma subyektif dan norma-norma moral memiliki efek positif pada niat. Norma-norma moral dapat ditambahkan untuk analisis *theory of planned behaviour*. Hal ini disetujui bahkan

akan memiliki peran dalam membentuk niat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa norma-norma moral dapat menjadi faktor yang menjelaskan mengapa anggota organisasi kemahasiswaan melakukan tindakan *whistleblowing*.

Whistleblowing Mechanism

Whistleblowing merupakan penerapan kebijakan yang memungkinkan karyawan atau

individu lain dalam suatu organisasi untuk melaporkan pelanggaran melalui saluran sistem pelaporan tertentu (Johnsen, 2011). Selain itu, *whistleblowing* secara umum dapat dikatakan sebagai pengungkapan fakta atas kesalahan yang dirasakan, pengungkap fakta atas kesalahan tersebut disebut sebagai *whistleblower* (Trevino & Victor, 1992). Selanjutnya, *whistleblowing* juga dapat diartikan sebagai sebuah aksi pengungkapan atas kecurangan, praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah oleh salah satu anggota organisasi kepada pihak lain yang dapat melakukan tindakan atas pengungkapan tersebut (Gao & Brink, 2017).

Dalam tindakan pendeteksian *fraud* pada pengelolaan dana organisasi, selain dengan menerapkan proses audit yang cukup efektif, *whistleblowing* juga merupakan salah satu cara yang cukup mudah dalam mendeteksi adanya *fraud*. Dengan adanya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, perusahaan memiliki kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. *Whistleblowing* juga dapat berperan dalam pencegahan *fraud*. Akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif (Tuanakotta, 2012).

Hadirnya *whistleblowing* di organisasi kemahasiswaan dapat menjadi pengingat dan ancaman bagi setiap anggota organisasi kemahasiswaan yang memiliki niat untuk melakukan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi, bahwa terdapat sarana yang dapat mengontrol kegiatan keuangan dan operasional organisasi. Pengawasan atas kegiatan organisasi menjadi lebih ketat karena semua anggota dapat berperan sebagai pengawas. Dengan demikian tindakan *fraud* tersebut dapat dicegah karena kesempatan untuk melakukan *fraud* telah dipersempit dengan adanya *whistleblowing*.

Keputusan tindakan melakukan *whistleblowing* yang dilakukan oleh anggota organisasi kemahasiswaan tergantung kepada intensi dari orang tersebut. Intensi yang dimiliki pada dasarnya dibangun oleh 3 (tiga) faktor yaitu, *attitude*, *subjective norms*, *perceived behavioural control* (Ajzen I. , 1991). Faktor keempat sebagai tambahan pada penelitian ini yaitu norma-norma moral (*moral norms*), yang mengacu pada ekspresi atau respons standar pribadi anggota organisasi atas *fraud* yang terjadi (Ajzen, 1991; 2002; Kurland, 1995; Adam & Shauki, 2014). Dengan demikian analisis dilakukan dengan mengevaluasi *attitude*, *subjective norms*, *perceived behaviour control*, dan *moran norms*. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan evaluasi intensi yang akan berpengaruh pada perilaku anggota organisasi kemahasiswaan dalam melakukan tindakan *whistleblowing* dan penentuan metode *whistleblowing* yang sesuai untuk organisasi kemahasiswaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Strategi Penelitian

Studi kasus merupakan strategi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Studi kasus merupakan metode untuk melakukan penelitian terhadap fenomena yang ada dengan berfokus terhadap *real life context* (Yin, 2003). Selain itu, studi kasus juga diartikan sebagai upaya mempelajari kekhususan dan kompleksitas sebuah kasus dengan memahami aktivitas dengan permasalahan-permasalahan yang penting (Stake, 1995). Metode *case study* ini cocok untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa” mengenai suatu fenomena atau kejadian secara mendalam (Shauki, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena ingin menggali fenomena mengenai pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi di organisasi kemahasiswaan.

Pendekatan/Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk memahami proses dan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam sehingga kemudian berdasarkan fenomena tersebut dapat diperoleh kesimpulan. Ritchie dan Lewis (2019) menyatakan bahwa penelitian kualitatif mengubah suatu fenomena yang terjadi dalam serangkaian representasi termasuk wawancara, foto, rekaman, memo, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

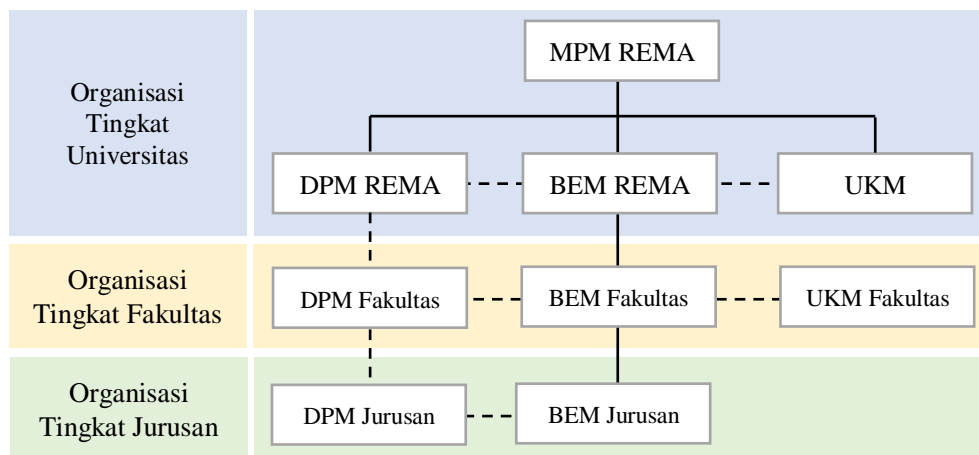
Pada penelitian ini sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan. Data primer tersebut bersumber dari hasil pengumpulan data berupa hasil kuesioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan laporan-laporan yang telah dipublikasi oleh organisasi kemahasiswaan dan beberapa dokumen pendukung lainnya.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data dengan jumlah yang besar dan ruang lingkup yang luas (Patten, 2016). Kuesioner disebar kepada 250 anggota organisasi kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia. Responden mengisi kuesioner secara *online* melalui *surveymonkey.com* yang didesain oleh penelitian ini untuk mempercepat

pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, wawancara juga dijadikan sebagai instrumen penelitian. Wawancara digunakan dengan tujuan untuk memvalidasi data yang diperoleh melalui kuesioner dan menggali fenomena secara lebih mendalam yang mungkin tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan kuesioner. Wawancara bersifat semi struktur yang dilakukan kepada 10 Pengurus Organisasi Kemahasiswaan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat lebih mendalam karena responden lebih memahami kondisi organisasi kemahasiswaan yang sedang dijalaninya.

Analisis Data

Content, dan *thematic analyses* adalah teknik analisa yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini. *Content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis suatu teks atau hal lain yang mengandung makna agar didapatkan kesimpulan yang dapat diterima dan dapat direplika sesuai dengan konteks yang akan digunakan (Krippendorff, 2004). Selanjutnya, *thematic analysis* adalah suatu cara dalam menganalisis data yang bertujuan untuk menemukan sebuah pola atau mengidentifikasi tema dari data (Braun & Clarke, 2006). Hasil kuesioner dan transkrip wawancara yang sebelumnya dikumpulkan dari responden merupakan data yang akan dianalisis. Analisa dilakukan dengan cara



Sumber: Peraturan Rektor UPI (data diolah oleh penulis)

Gambar 2. Struktur Organisasi REMA UPI

melakukan *coding* terhadap data yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya menentukan tema-tema dari setiap data, terakhir melakukan analisis dengan membandingkan tema-tema yang telah ditentukan.

Unit Analisa

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. UPI ini memiliki jumlah organisasi kemahasiswaan dan UKM terbanyak di Indonesia, sehingga sangat cocok untuk dijadikan objek penelitian. Organisasi kemahasiswaan tersebut ada sebanyak 133 organisasi. Terdiri dari 3 (tiga) organisasi tingkat universitas, 66 UKM, 8 (delapan) organisasi fakultas, dan 56 organisasi tingkat departemen/jurusan. Struktur organisasi kemahasiswaan Republik Mahasiswa (REMA) UPI seperti yang tergambar pada Gambar 2. Organisasi tingkat Universitas terdiri dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Organisasi tingkat Fakultas terdiri dari DPM, BEM, dan UKM. Sedangkan, Organisasi tingkat Jurusan terdiri dari DPM dan BEM.

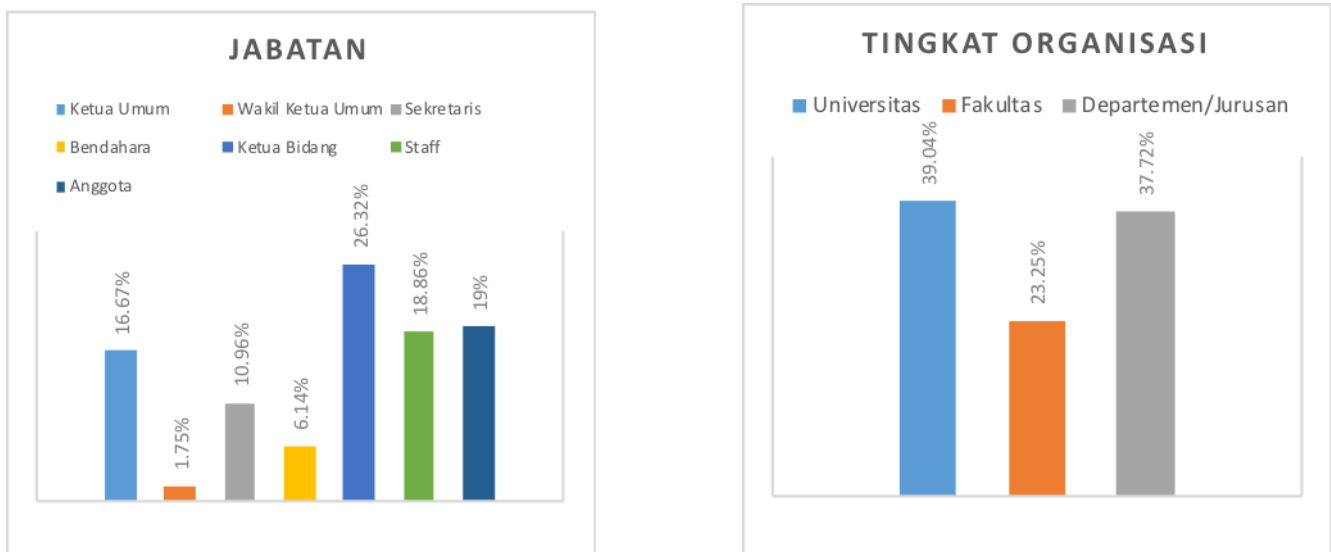
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Instrumen Kuesioner

Responden yang dapat memberikan tanggapan dengan lengkap hingga batas waktu yang ditentukan sebanyak 228 responden yang merupakan anggota dan/atau pengurus organisasi kemahasiswaan UPI (*responses rate* 91,20% dari 250 mahasiswa target responden). Seperti yang tergambar pada Gambar 3 responden tersebar dari tiga tingkat organisasi, hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran fenomena yang beragam. Begitu pun jabatan responden yang bermacam-macam diharapkan responden mampu memberikan pandangan sesuai dengan kondisi dan posisi yang dialami oleh masing-masing.

Terkait perlu atau tidaknya *whistleblowing* di organisasi kemahasiswaan, dilakukan *thematic analysis* dari *open ended question* mengenai opini perlu atau tidaknya *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi di organisasi kemahasiswaan. Hasil dari *thematic analysis* yang dilakukan tersaji pada Gambar 4.

Seperti yang disajikan pada Gambar 4 tema yang ditemukan lebih banyak merujuk pada perlu adanya *Whistleblowing* di organisasi kemahasiswaan. Responden menilai banyak manfaat yang dapat diperoleh

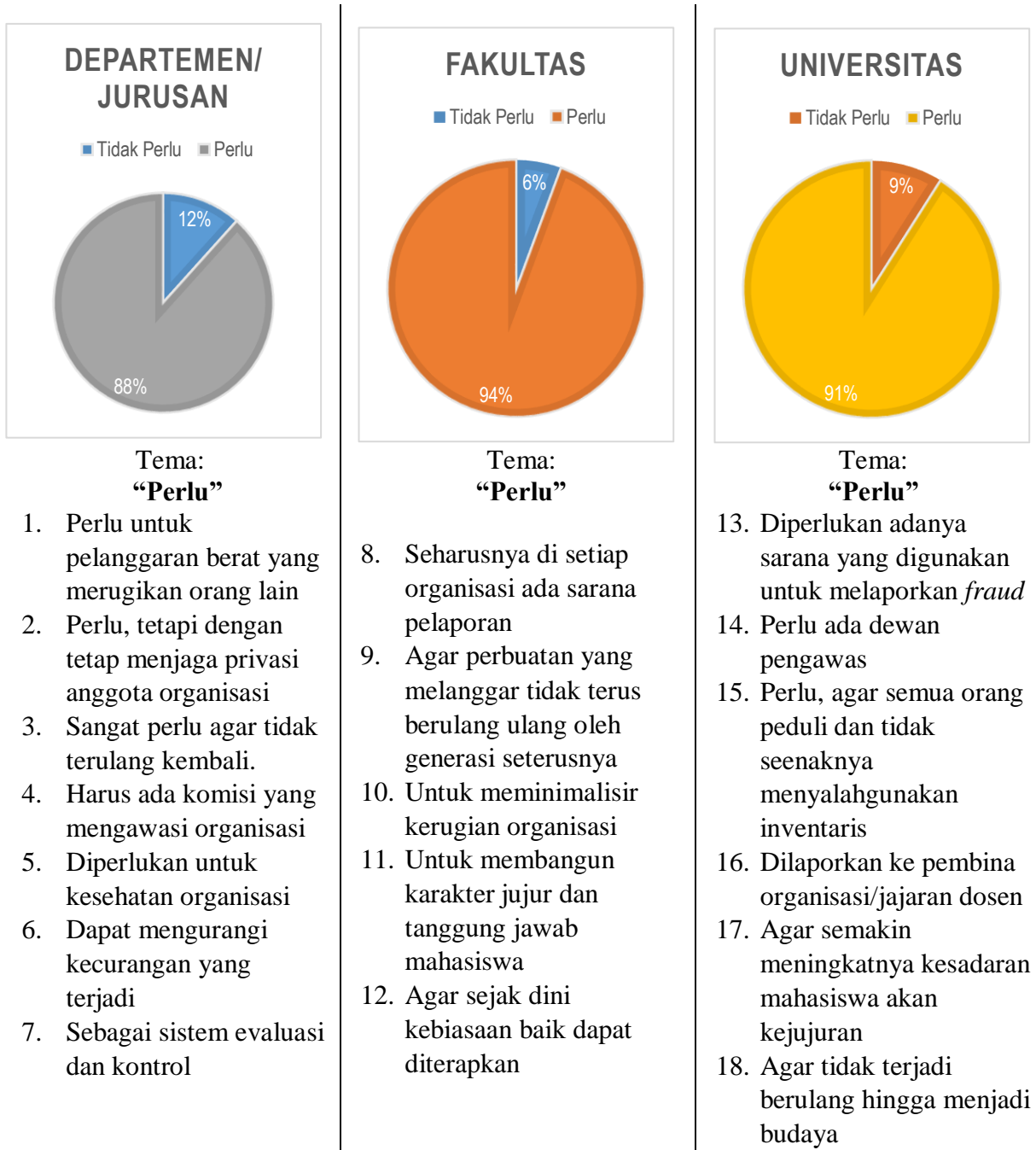


Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 3. Hasil Survei - Demografi

melalui penerapan *whistleblowing* yang tertuang dalam 18 tema di Gambar 4. Dengan demikian perlu adanya *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan fraud pada pengelolaan dana organisasi di organisasi kemahasiswaan.

Terkait pendekatan *whistleblowing* yang cocok diterapkan di organisasi kemahasiswaan, melalui survei, penulis menemukan fenomena di mana *internal whistleblowing* lebih dipilih oleh responden di banding *eksternal whistleblowing*.



Sumber: data diolah oleh penulis

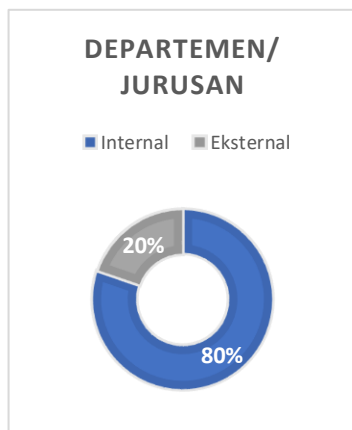
Gambar 4. Hasil Survei – Alasan (*Reasoning*) Perlu atau Tidak *Whistleblowing*

Berdasarkan hasil *thematic analysis* dari *open ended question* mengenai pilihan pendekatan *whistleblowing* untuk di

organisasi kemahasiswaan didapatkan 17 tema yang dominan muncul dalam respons responden yang menyatakan internal

whistleblowing lebih cocok digunakan dalam organisasi kemahasiswaan, seperti yang tergambar pada Gambar 5. Hal ini dianggap mahasiswa lebih efektif dalam mengurangi

tindakan *fraud*.. Proses tindak lanjut dari laporan juga akan lebih sesuai dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan ala mahasiswa.

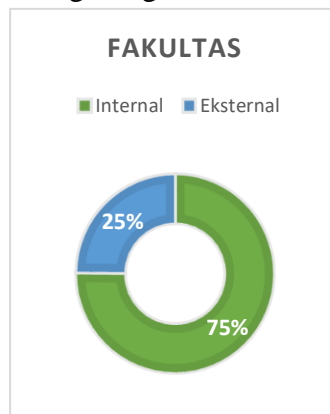


Tema:
“Internal”

1. Eksternal, *cost* yang digunakan akan lebih tinggi
2. Dapat diatasi segera dan rahasia organisasi
3. Yang benar-benar mengetahui adalah orang internal
4. Diupayakan agar selesai di internal organisasi terlebih dahulu.
5. Agar evaluasi mudah dilakukan
6. Terlalu rumit apabila melibatkan pihak luar

“Eksternal”

1. Pengawasan eksternal diperlukan agar timbul kehati-hatian
2. Karena independen dan tidak terdapat suatu hubungan yang intim terhadap pelaku *fraud*
3. Karena *external whistleblowers* lebih netral

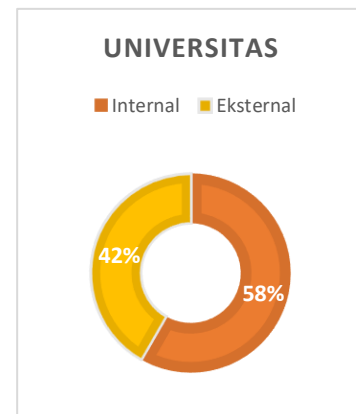


Tema:
“Internal”

7. Pendekatan yang paling cocok untuk kemahasiswaan
8. Pihak internal memiliki informasi lebih banyak
9. Mencegah *fraud* namun tidak menghancurkan organisasi
10. Karena menyangkut organisasi jadi harus diselesaikan dalam organisasi
11. Karena perbaikan dimulai dari dalam struktur atau lingkungan terdekat terlebih dahulu

“Eksternal”

4. Jika internal ada upaya perlindungan yang diberikan karena faktor kedekatan dengan pelaku
5. Percuma jika masih satu komplotan, saling melindungi
6. Untuk mengurangi jumlah tekanan pertemanan



Tema:
“Internal”

12. Agar tidak ada campur tangan orang lain yang dapat membuat perpecahan semakin terjadi
13. Untuk menghindari fitnah
14. Kalau masih ringan bisa diselesaikan di internal.
15. Sebagai bukti kepedulian internal
16. Pihak internal lebih mudah menyelediki karena lebih paham kondisi organisasi
17. Karena organisasi yang sifatnya kekeluargaan

“Eksternal”

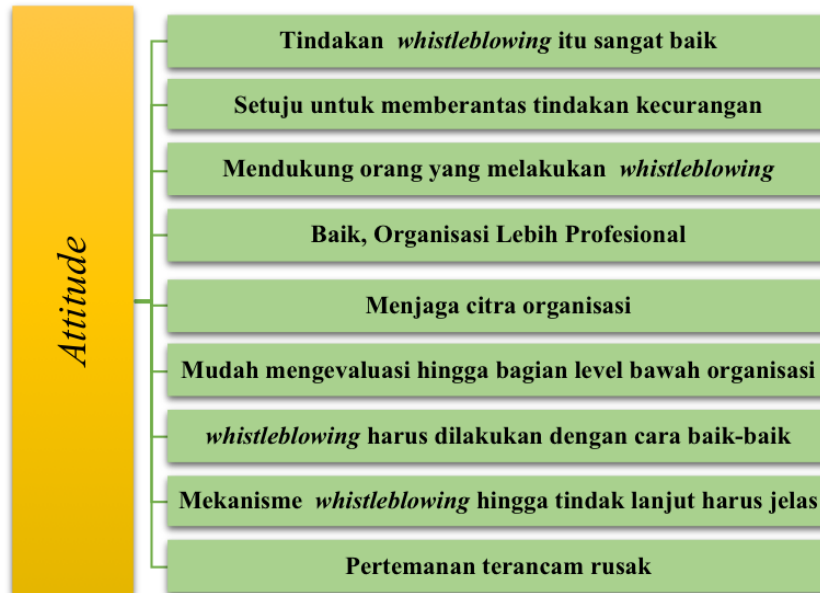
7. Sering kali sesama pihak internal ada rasa sungkan
8. Memungkinkan untuk bersikap netral
9. Terlihat lebih independen
10. Akan memberikan efek jera yang lebih besar
11. Lebih bisa sedikit dipercaya dan diandalkan

Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 5. Hasil Survei – Pendekatan *Whistleblowing* Yang Cocok Diterapkan

Temuan dari Instrumen Wawancara

melakukan tindakan *whistleblowing*, setelah



Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 6. Hasil Wawancara – Sikap Anggota Organisasi dalam Melakukan Tindakan *Whistleblowing*

Hingga batas waktu yang ditentukan, terdapat sepuluh organisasi yang dapat diwawancarai (*responses rate* 100% dari target 10 organisasi). Responden dari sepuluh organisasi tersebut memiliki posisi dan jabatan yang berbeda-beda di organisasi kemahasiswaannya masing-masing. Dari sepuluh responden tersebut jabatan responden terdiri dari, dua orang Ketua Umum, tiga orang Bendahara, empat orang Ketua Bidang, dan satu orang Staf. Tujuannya adalah untuk memperkaya dan memperdalam informasi guna menemukan fenomena.

Terkait sikap (*attitude*) anggota organisasi dalam melakukan tindakan *whistleblowing*, dilakukan analisis tematik yang tersaji pada Gambar 6. Terdapat 9 (sembilan) sub tema yang didapat dari 10 responden. Meskipun terdapat beberapa sikap yang mendukung dan setuju dengan adanya *whistleblowing*, namun terdapat beberapa sikap dari responden yang menyatakan bahwa tindakan *whistleblowing* ini harus dilakukan dengan baik-baik, ditambah dengan kejelasan mekanisme, karena kalau itu tidak berjalan maka hubungan pertemanan antar anggota akan rusak.

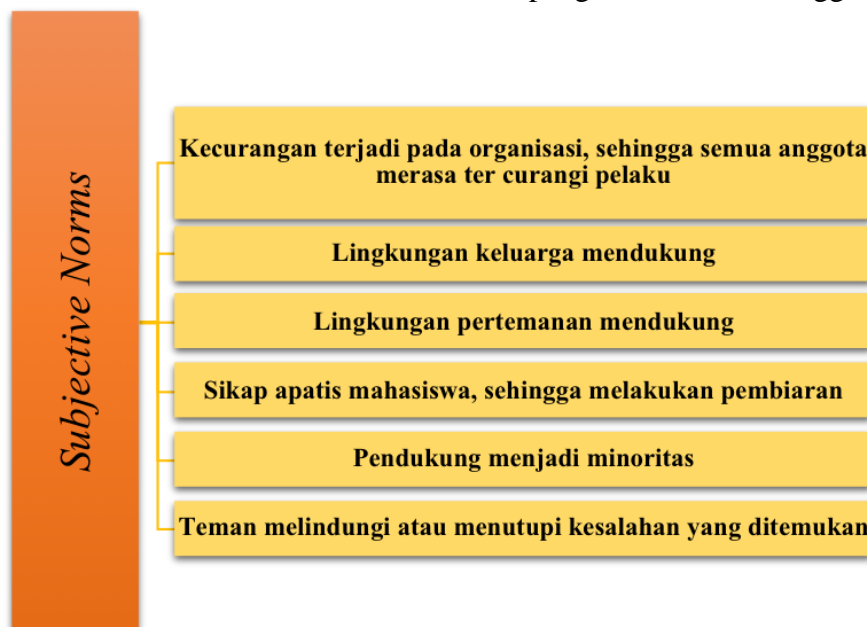
Terkait norma-norma subjektif (*subjective norms*) anggota organisasi dalam

dilakukan analisis tematik seperti yang tertuang pada Gambar 7. Terdapat 6 (enam) sub tema yang ditemukan dalam hasil wawancara kepada sepuluh responden. Tidak semua responden menyatakan mendapat dukungan dari orang terdekat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Beberapa responden menyatakan bahwa pihak yang mendukung akan sangat jarang dan menjadi minoritas, bahkan lingkaran pertemanan salah satu responden cenderung menutupi kesalahan yang ditemukan.

Terkait *perceived behavioural control* anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan, pada Gambar 8. Setelah dilakukan analisis tematik terdapat 5 (lima) sub tema yang ditemukan dalam hasil wawancara kepada sepuluh responden. Hal senada dengan pernyataan sebelumnya tidak seluruh responden mendapat kemudahan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.

Terkait *moral norms* anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan, pada Gambar 9. Setelah dilakukan analisis tematik terdapat 3 (tiga) sub tema yang ditemukan. Seluruh responden menyatakan pernyataan yang sama bahwa *moral norms* mendukung terbentuknya intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

dominasi keempat faktor tersebut yang dapat mempengaruhi niat anggota organisasi



Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 7. Hasil Wawancara – *Subjective Norms* Anggota Organisasi dalam Melakukan Tindakan *Whistleblowing*

Terkait Intensi anggota organisasi terhadap tindakan *whistleblowing*, seluruh responden menyatakan akan melakukan tindakan *whistleblowing*. Seperti yang tersaji di Gambar 10. Terdapat 4 (empat) sub tema yang ditemukan dalam hasil wawancara kepada sepuluh responden.

Pembahasan

Penelitian ini memiliki kerangka untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi kemahasiswaan dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang selanjutnya dapat ditentukan model *whistleblowing* yang cocok untuk diterapkan. Faktor tersebut diantaranya *attitude*, *subjective norms*, *perceived behavioural control*. Selanjutnya, telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya bahwa hubungan niat dan perilaku anggota kemahasiswaan dapat ditingkatkan dengan menambahkan *moral norms*. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat

kemahasiswaan dalam melakukan pelaporan atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi. Diskusi mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian ini diuraikan selanjutnya.

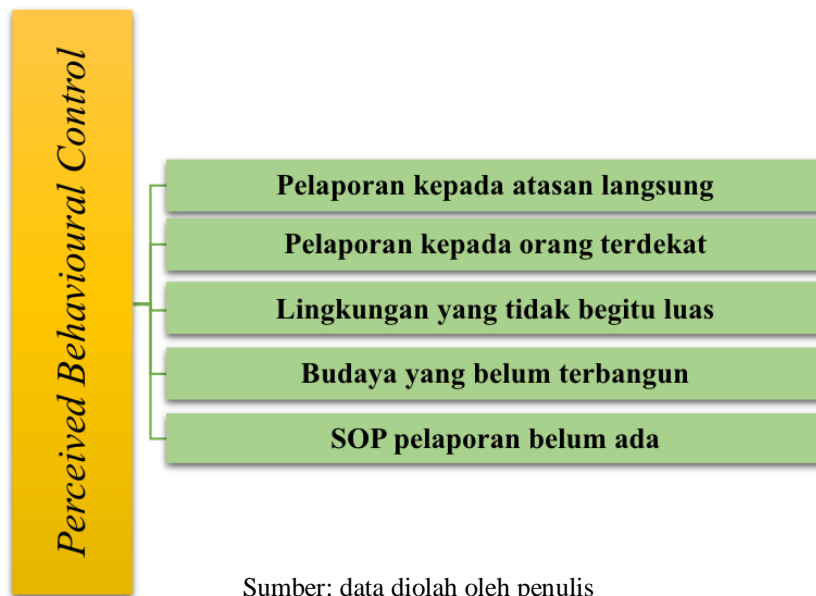
Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam organisasi kemahasiswaan perlu ada *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* diperlukan agar terdapat sarana sehingga anggota organisasi mudah dalam melakukan pelaporan. *Whistleblowing* juga diharapkan mampu menjadi alat evaluasi dan pengawasan atas tata kelola organisasi kemahasiswaan. Selain itu, tentu sarana ini digunakan untuk menjadi pendidikan bagi mahasiswa mengenai upaya pencegahan tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi.

Attitudes

Terkait pelaporan tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang dilakukan oleh anggota organisasi kemahasiswaan yang mana merupakan teman sendiri, secara umum sikap anggota organisasi kemahasiswaan positif terhadap tindakan pelaporan. Pertama,

responden bersikap bahwa tindakan pelaporan merupakan tindakan yang baik namun perlu

Namun terdapat pernyataan responden yang menyebutkan bahwa tindakan pelaporan



Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 8. Hasil Wawancara – *Perceived Behavioural Control* Anggota Organisasi dalam Melakukan Tindakan *Whistleblowing*

dibuat sistem khusus mengenai pelaporan ini. Kedua, responden setuju dengan adanya tindakan pelaporan ini untuk memberantas tindakan kecurangan. Ketiga, responden juga bersikap mendukung orang yang melakukan tindakan pelaporan. Keempat, responden berpendapat bahwa tindakan pelaporan dapat menjaga profesionalitas dalam berorganisasi dan mampu menjaga citra organisasi. Terakhir, responden berpendapat bahwa kecurangan memang harus dilaporkan namun pelaporan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden dari organisasi tingkat fakultas sebagai berikut:

“Saya setuju. Pertama karena menjaga profesionalitas dalam berorganisasi, kedua menjaga citra organisasi. Karena kalau misalkan itu dilaporkan akan memperbaiki organisasi dan memberikan efek jera kepada pelaku. Karena saya tuh meyakini bahwa kalau sekarang kita nerima Rp. 10,000 ke depannya bakal nerima Rp. 100,000 dan pasti akan terus meningkat, itu yang menjadi cikal bakal korupsi”

ini dapat mengancam keharmonisan hubungan pertemanan antar sesama anggota organisasi. Hal ini juga menjadi kerugian yang disebutkan oleh seluruh responden, bahwa kerugian dari tindakan pelaporan ini adalah dapat menimbulkan masalah hubungan pertemanan. Pernyataan ini salah satunya diungkapkan oleh responden dari organisasi tingkat universitas, sebagai berikut:

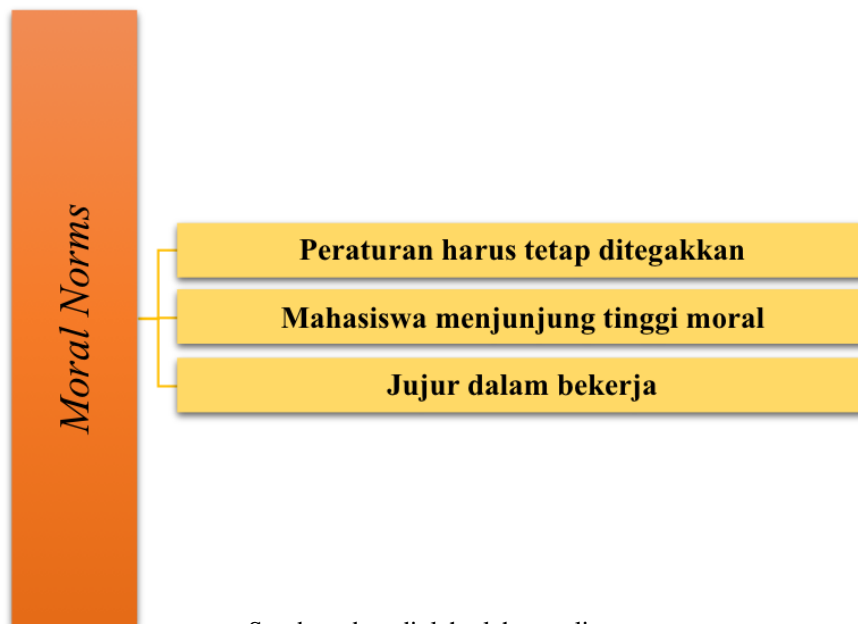
“Kalau kerugian mungkin semua orang juga tau gitu pasti bakal ada kemungkinan hubungan yang tidak harmonis karena yang dilaporin adalah temen sendiri”

Hal ini juga menjadi kerugian yang disebutkan oleh seluruh responden, bahwa kerugian dari tindakan pelaporan ini adalah dapat menimbulkan masalah hubungan pertemanan. Berhubung organisasi kemahasiswaan merupakan organisasi dalam lingkup kecil, anggota yang tergabung adalah atas dasar kesamaan, baik karena sama satu jurusan, satu fakultas, satu universitas, satu hobi yang sama, dan satu peminatan yang sama. Selain itu, tuntutan profesionalitas dalam bekerja di organisasi kemahasiswaan tidaklah tinggi, karena memang dasar dari terbentuknya organisasi ini bukan untuk

mengejar profit. Sehingga hubungan kekeluargaan, pertemanan, keharmonisan dalam berkomunikasi menjadi modal penting yang harus dijaga oleh organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian faktor *attitude* tidak dominan dalam mendukung niat

menjamin keamanan bagi pelapor. Selain itu, guna menambahkan keuntungan dari adanya *whistleblowing*, pemberian *reward* kepada *whistleblower* dapat dilakukan.

Subjective Norms



Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 9. Hasil Wawancara – *Moral Norms* Anggota Organisasi dalam Melakukan Tindakan *Whistleblowing*

anggota organisasi kemahasiswaan dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi di organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan evaluasi di atas upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan *attitude* mahasiswa terhadap tindakan *whistleblowing* atas *fraud* yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan adalah dengan meminimalisir kerugian yang kemungkinan timbul. Mahasiswa menganggap ada potensi kerugian berupa ancaman terhadap keharmonisan hubungan antar anggota organisasi. Maka implementasi *whistleblowing* harus dilakukan dengan memprioritaskan keamanan dan kerahasiaan *whistleblower*. Identitas *whistleblower* tidak dipublikasikan ke publik, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan konflik di internal organisasi baik antar pelapor dan terlapor maupun antar anggota organisasi lainnya. Selanjutnya organisasi kemahasiswaan atau pengelola *whistleblowing* harus mampu

Secara umum organisasi kemahasiswaan yang menjadi responden penelitian ini, norma-norma subjektif berupa dukungan dari orang terdekat saat ini sudah baik. Dukungan ini didapat dari dua sumber, pertama dukungan dari teman terdekat dan kedua dukungan dari keluarga. Salah satu dukungan didapat dari teman terdekat dikarenakan teman tersebut yang merupakan sesama anggota organisasi kemahasiswaan merasa dicurangi apabila terdapat tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi di organisasi tersebut. Dengan demikian dukungan muncul akibat terdapat keresahan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh responden dari organisasi tingkat universitas sebagai berikut:

“Ada sih kang yang mendukung, pastinya kita juga kesel dengan hal-hal kaya gitu. Masalahnya kita di dalam suatu Lembaga, dia mencurangi Lembaga tersebut, secara tidak langsung dia juga mencurangi

kita yang ada di dalamnya. Walaupun secara langsung gak kena nih sama kita, cuman secara tidak langsung ya kita ngerasa kesal itu ada. Karena mungkin rasa memiliki kita terhadap

Lembaga juga ada, sehingga kita gak mau nih Lembaga kita terluka kaya gini. Makanya ketika ada kecurangan kaya gitu, suka ada tuh orang yang ngedukung dukung buat ngelaporin.”

menyatakan hal serupa, beberapa responden menyatakan bahwa tidak terdapat dukungan dalam melakukan tindakan pelaporan, walaupun ada yang mendukung mereka adalah kelompok minoritas, yang tentunya tidak akan kuat dalam mendukung. Seperti yang diungkapkan oleh responden dari organisasi tingkat universitas berikut ini:

“Jarang sih jarang yang ada yang ngedukung gitu paling rata-rata ah biarin saja itu urusan dia gitu kan jarang banget orang yang kepengen banget kecurangan itu dilaporin mungkin karena risiko yang besar, risiko nama baik atau resiko dijauhin, lebih dipikirkan jadi kalau teman-teman terdekat sih jarang yang ngrekomendasiin buat ngelaporin kecurangan ya udahlah biarin saja itu urusan mereka gitu”

Hal ini terjadi akibat tumbuhnya sikap apatis di kalangan mahasiswa, yang kemudian cenderung melakukan pembiaran atas praktik *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Selain itu, akibat hubungan pertemanan, yang menurut salah satu responden sebagai teman kita harus menerima kebaikan dan keburukannya, anggota organisasi kemahasiswaan cenderung akan menutupi *fraud* tersebut yang telah dilakukan oleh rekannya. Selanjutnya, praktik menutupi praktik *fraud* ini dikarenakan upaya organisasi ataupun anggota organisasinya untuk menghindari dari masalah yang kemungkinan akan menyulitkan organisasi atau anggota organisasi tersebut. Sebagai tambahan, jarangnyanya mahasiswa mendukung temannya untuk melakukan tindakan pelaporan adalah karena risikonya besar, risiko untuk diketahui identitas pelapor sehingga meningkatnya risiko rusaknya pertemanan, hal ini tentunya diakibatkan oleh tidak adanya sistem dan mekanisme dalam pelaporan. Dengan demikian faktor *subjective norms* menjadi tidak dominan dalam mendukung niat dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud* pada pengelolaan dana

organisasi yang terjadi di organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan evaluasi di atas upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan *subjective norms* mahasiswa terhadap tindakan *whistleblowing* atas *fraud* yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan adalah dengan memberikan pemahaman kepada anggota tentang kerugian yang diderita organisasi yang kemudian menjadi kerugian yang diderita oleh seluruh anggota organisasi yang diakibatkan oleh *fraud*. Upaya ini dapat dilakukan pada saat masa orientasi bagi anggota baru dan pada saat pelatihan bagi pengurus baru. Dengan demikian, anggota organisasi akan memiliki pemahaman sejak dini bahwa *fraud* akan menjadi keresahan bersama dan seluruh anggota akan sadar atas pentingnya mendukung pihak yang melakukan tindakan *whistleblowing*.

Perceived Behavioral Control

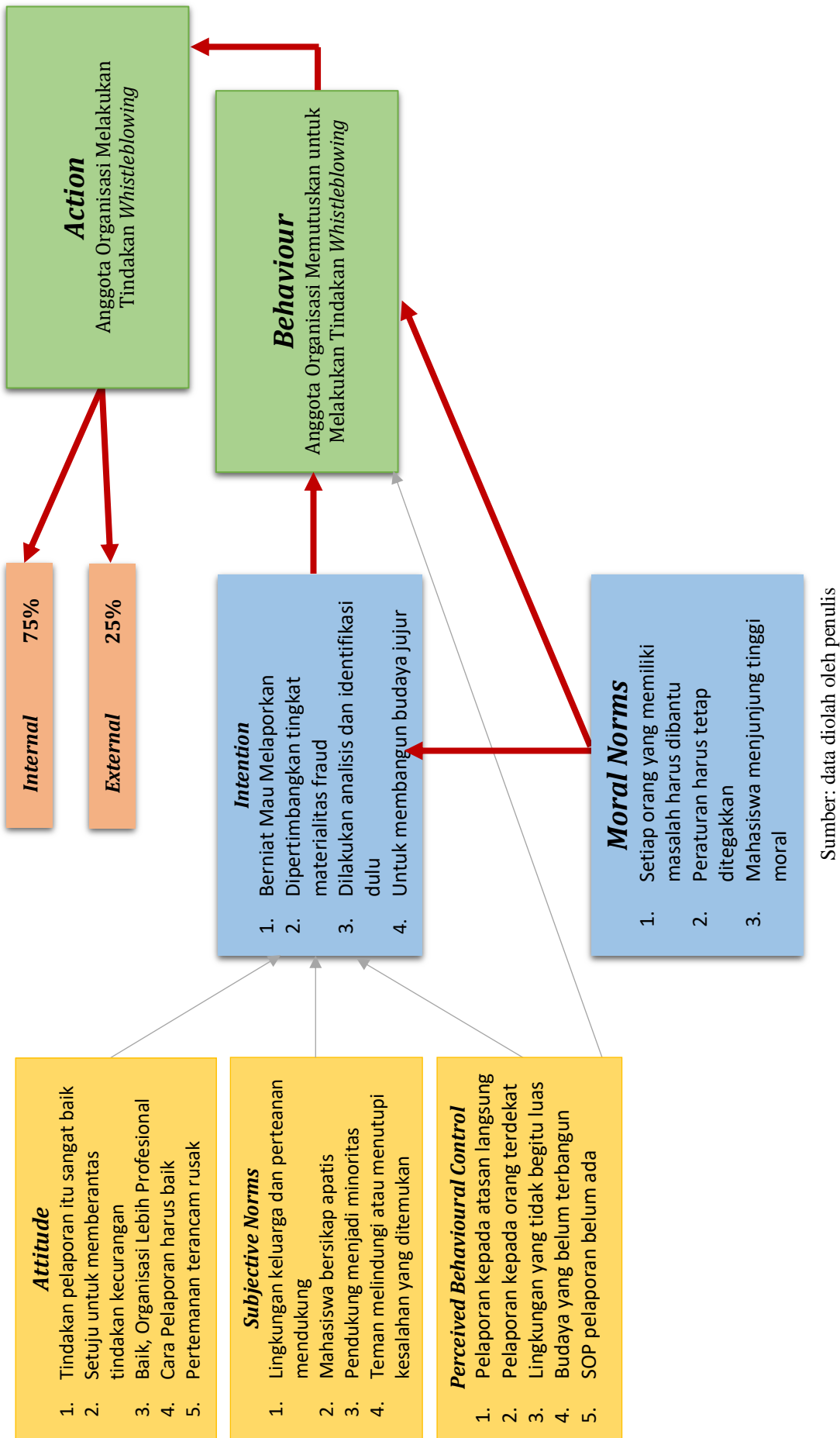
Dari sisi *perceived behavioral control* terdapat dua fenomena besar. Pertama, anggota organisasi kemahasiswaan mudah melakukan pelaporan. Kemudahan ini diperoleh anggota organisasi kemahasiswaan karena pelaporan dilakukan kepada atasan langsung. Kecenderungan mudahnya melakukan pelaporan kepada atasan langsung adalah karena adanya faktor kedekatan antara pelapor dan penerima laporan. Faktor kedekatan penting untuk kepercayaan pelapor, karena mengingat informasi yang akan disampaikan sensitif dan jika tidak disikapi dengan baik akan menambah masalah baru baik bagi organisasi maupun bagi individu anggota organisasi kemahasiswaan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu responden dari organisasi tingkat universitas sebagai berikut:

“Alhamdulillah mudah sih soalnya kan Saya di sini jabatannya sebagai bendahara ya jadi lebih banyak interaksi sama ketuanya langsung jadi kalau ada anggota terus pengurus lain yang melakukan kecurangan jadi bisa langsung lapor saja ke ketua lewat chat gitu kan bisa lebih ga ketahuan”

Kedua, anggota organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama budaya organisasi yang cenderung apatis terkait tata kelola organisasi sehingga tidak memungkinkan adanya partisipasi pelaporan dari anggota. Tentu dengan kurangnya partisipasi pelaporan ataupun kurangnya tindak lanjut dari pelaporan oleh pihak berwenang di internal organisasi akan menyulitkan dalam proses pelaporan. Kedua, karena tidak adanya SOP atau mekanisme pelaporan. Ini merupakan akar dari kesulitan-

kesulitan yang telah dibahas di atas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden dari organisasi tingkat fakultas sebagai berikut:

“Kalau melihat kondisi sekarang agak susah, karena SOP pelaporannya belum ada. Di beberapa organisasi bahkan SOP itu menjadi hal yang langka gitu ya. Karena mereka banyak kerja tanpa SOP. Terus juga yang biasanya melakukan hal itu adalah orang-orang yang posisinya strategis. Kalaupun mau ngelaporin, SOP nya tidak ada, ngelaporinnya ke mana atau ke siapa.



Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 11. Peta Temuan Penelitian

Terus walaupun ngelapor orang itu pasti ngejaga citra organisasinya. Jangan sampai kedengeran sama organisasi lain yang lagi nunggu-nunggu ada kesalahan dari organisasi tersebut, rival politik lah katakanlah. Itu bakal jadi boomerang bagi organisasi si pelapor. Makanya sekarang kejadian-kejadian kecurangan itu pasti banyak cuman pasti langsung di keep tuh sama organisasi itu”

Tidak adanya sarana, mekanisme, sistem dalam melakukan pelaporan menyebabkan kerugian yang dibahas pada *attitude* dan kurangnya dukungan yang dibahas pada *subjective norms* menjadi tidak dapat dikelola dengan baik. Selain itu, tentu dengan tidak adanya sarana, mekanisme, dan sistem, anggota organisasi kemahasiswaan tidak dapat melakukan tindakan pelaporan dan menindaklanjuti pelaporan dengan baik. Dengan demikian *perceived behavioral control* menjadi tidak dominan untuk mendukung intensi dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud* pada pengelolaan dana organisasi.

Peran institusi organisasi terlihat jelas di sini dalam mempengaruhi perilaku anggota dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Institusi organisasi yang berperan sebagai penyedia sarana, sistem, dan pengawasan atas implementasi *whistleblowing* dianggap oleh responden sebagai suatu hal yang menyebabkan mudah atau tidaknya dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Dari hasil analisis di atas tidak adanya keberadaan sarana, mekanisme, dan sistem dianggap sebagai sebuah hambatan yang menyebabkan sulitnya melakukan tindakan *whistleblowing*.

Berdasarkan evaluasi di atas upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan *perceived behavioral control* mahasiswa terhadap tindakan *whistleblowing* atas *fraud* yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan adalah dengan membentuk SOP. SOP yang jelas ini dibutuhkan untuk mengatur tindakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi. Selain itu, dengan adanya sarana,

mekanisme, dan sistem akan memudahkan anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan. Selain itu, standar laporan keuangan untuk organisasi kemahasiswaan haruslah dibentuk. DPM selaku lembaga legislatif dari Republik Mahasiswa UPI bisa ambil peran untuk membuat standar laporan keuangan dalam bentuk undang-undang keuangan yang dapat diterapkan di seluruh organisasi kemahasiswaan UPI.

Moral Norms

Terkait norma-norma moral, penulis menemukan berbagai macam norma-norma moral yang dianut oleh responden selaku mahasiswa anggota dari organisasi kemahasiswaan. Pertama, anggota organisasi kemahasiswaan harus memiliki pandangan bahwa peraturan harus tetap ditegakkan. Begitu pun perihal tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi di organisasi kemahasiswaan. Jika terdapat praktik *fraud* tersebut, maka harus dilaporkan dan ditindak sebagaimana mestinya agar tidak ada lagi praktik *fraud* serupa di kemudian hari. Kedua, sebagai mahasiswa menjunjung tinggi moral, karena pola gerakan mahasiswa adalah gerakan moral. Maka jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan moral, mahasiswa harus bergerak. Salah satu gerakan yang dilakukan adalah dengan melakukan pelaporan. Ketiga, kejujuran menjadi penting bagi setiap anggota organisasi kemahasiswaan dalam bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden yang berasal dari organisasi tingkat fakultas sebagai berikut:

“Menurut saya bagus nya mahasiswa melakukan pelaporan. Alasannya ada dua, pertama bagus menurut idealis itu harus dilaporkan untuk memberikan pelajaran juga kepada pelapor dan terlapor. Terus yang kedua juga pembelajaran moral dalam hal ini bagaimana keberanian untuk katakanlah menindak orang yang salah. Secara moral ada lah dalam diri kita semua selaku mahasiswa. Karena mahasiswa bergerak berdasarkan moral, gerakan berbasis moral. Kita pasti mengutuk tindakan

kecurangan, apalagi yang merugikan organisasi.”

Seluruh responden dalam penelitian ini memiliki pandangan yang sama mengenai moral norms. Sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai moral dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian seluruh anggota organisasi kemahasiswaan memiliki *moral norms* yang dominan sehingga mampu mendukung intensi dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud*.

Berdasarkan evaluasi di atas upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan *moral norms* mahasiswa terhadap tindakan *whistleblowing* atas *fraud* yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan adalah dengan memberikan pemahaman mengenai moral-moral yang dipegang oleh mahasiswa. Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai gerakan moral sebagai landasan pergerakan mahasiswa sejak masa orientasi kampus. Pemahaman ini terus diberikan di berbagai jenjang orientasi yang ada baik pada tingkat universitas, fakultas maupun tingkat departemen/jurusan selama tahun pertama. Hal ini sangat penting dilakukan di awal sebelum pemahaman-pemahaman lainnya lebih dahulu masuk dan menghilangkan esensi mahasiswa yang seharusnya.

Intentions

Terkait Intensi Anggota Organisasi terhadap tindakan pelaporan, seluruh responden menyatakan akan melakukan tindakan pelaporan. Namun sebelum melakukan pelaporan akan menganalisis dan mengidentifikasi apakah tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang dicurigai benar-benar terjadi. Setelah yakin baru kemudian dilakukan tindakan pelaporan. Selain itu, anggota organisasi akan melakukan pelaporan dengan pertimbangan tingkat materialitas dari *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi. Jika dianggap material maka akan dilaporkan. Selanjutnya, responden ingin melakukan tindakan pelaporan karena ingin membangun budaya jujur di organisasi kemahasiswaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu

responden dari organisasi tingkat fakultas berikut ini:

“Kalau saya lihat dulu seberapa besar kecurangan yang dilakukan. Kalau hanya sebatas penggunaan printer untuk kepentingan pribadi semisal ngeprint tugas, enggak sampai dilaporkan, paling di sindir aja kalau ketahuan. Tapi kalau kasusnya sampai penggelapan dana, karena pernah ada kasus uang dibawa lari oleh salah satu anggota, saya laporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kampus dan kepolisian”

Namun kritik penulis atas pendapat responden ini adalah tindakan *fraud* tidak perlu dipertimbangkan lagi tingkat materialitas. Poin penting dari terjadinya *fraud* di lingkungan organisasi kemahasiswaan bukan hanya sebatas kerugian organisasi, tapi juga krisis moral di mana perilaku *fraud* terus terjadi dan berkembang. Maka dari itu, penulis menyarankan agar tindakan pelaporan atas tindakan *fraud* tidak perlu untuk menjadikan materialitas sebagai pertimbangan. Berapa pun besar kerugian yang ditimbulkan baik kecil maupun besar, jika terjadi *fraud* maka segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi, yaitu *attitude*, *subjective norms*, *perceived behavioural control*, dan *moral norms*, tidak semuanya memberikan dukungan yang dominan terhadap niat anggota organisasi kemahasiswaan. Faktor *attitude*, *subjective norms*, dan *perceived behavioural control* tidak menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan niat anggota organisasi kemahasiswaan untuk melakukan tindakan pelaporan atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi, sedangkan *moral norms* menjadi faktor dominan yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi kemahasiswaan. Walaupun demikian pada akhirnya anggota organisasi kemahasiswaan

tetap bersedia dan mau dalam melakukan tindakan pelaporan. Seperti yang digambarkan pada Gambar 11, penelitian ini sejalan dengan Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). Namun pada penelitian ini menambahkan analisis tingkat dominan pengaruh faktor-faktor dalam pembentukan niat. Pada Gambar 11 menunjukkan bahwa niat anggota organisasi kemahasiswaan untuk melakukan tindakan pelaporan dipengaruhi kuat oleh *moral norms* yang dianut oleh mahasiswa.

Dengan demikian pada penelitian ini ditemukan bahwa tidak selamanya seluruh faktor-faktor dibutuhkan untuk membangun niat anggota kemahasiswaan untuk melakukan pelaporan atas tindakan *fraud* pada pengelolaan dana organisasi. Sehingga peta penelitian ini, seperti yang tergambar pada Gambar 11, *moral norms* mampu memberikan panah tebal yang berarti memberikan pengaruh dominan dalam pembentukan niat dan perilaku untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Oleh karena itu moral seorang anggota organisasi kemahasiswaan sangat penting dalam mempengaruhi keputusan perilaku anggota organisasi kemahasiswaan dalam melakukan pelaporan atas *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi.

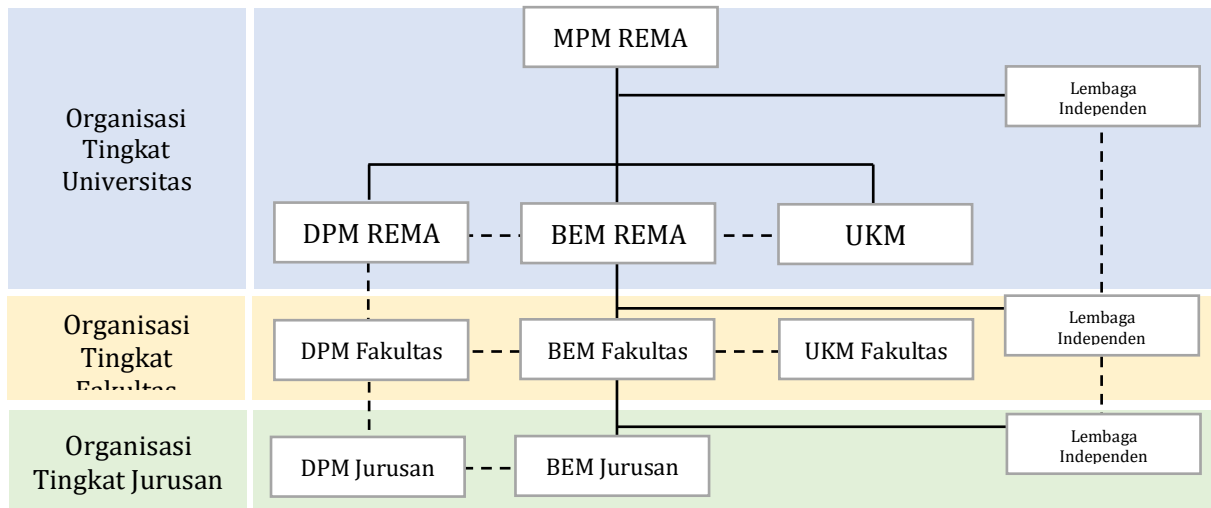
Model Whistleblowing

Pada organisasi kemahasiswaan sebagian besar responden memilih untuk menggunakan pendekatan *internal whistleblowing*. Responden menilai pihak internal lebih mengerti kondisi organisasi

sehingga dapat menyikapi dengan baik dan sesuai dengan budaya organisasi yang berjalan. Selain itu biaya yang akan dikeluarkan dengan menggunakan pendekatan ini relatif kecil. Manfaat lainnya rahasia dan citra organisasi dapat terjaga.

Pendekatan *internal whistleblowing* ini diartikan oleh responden sebagai tindakan pelaporan yang dilakukan, dikelola, dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa. Tidak ada campur tangan dari pihak kampus maupun pihak lainnya di luar kampus. Sistem organisasi kemahasiswaan UPI menganut sistem Republik Mahasiswa (REMA) sehingga terdapat tiga fungsi dalam struktur Republik Mahasiswa yang dikenal sebagai Trias Politika, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka *whistleblowing* dapat dikelola oleh fungsi yudikatif yang mana saat ini belum terdapat lembaganya di REMA UPI, meskipun secara fungsi tidak langsung dipegang oleh MPM REMA, namun dalam pelaksanaannya dinilai tidak efektif. Maka pendirian lembaga independen yang memiliki fungsi yudikatif ini dapat dilakukan agar implementasi *whistleblowing* dapat berjalan.

Penempatan lembaga independen ini, dengan melihat struktur organisasi Republik Mahasiswa UPI, cocok diletakkan pada posisi leher di bawah MPM seperti yang tergambar pada Gambar 12. Lembaga ini tidak hanya akan ada di tingkat universitas, tapi juga ada di tingkat fakultas dan departemen/jurusan yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap organisasi



Sumber: Peraturan Rektor UPI (data diolah oleh penulis)

Gambar 12. Usulan Struktur Organisasi REMA Dengan Lembaga Independen

kemahasiswaan. Lembaga ini akan bertanggung jawab kepada MPM REMA selaku organisasi tertinggi, yang nantinya akan disidangkan dalam Sidang Umum REMA UPI. Begitu pun di tingkat Fakultas dan Departemen/Jurusan, lembaga ini akan bertanggungjawab kepada kongres/sidang/musyawarah mahasiswa masing-masing organisasi kemahasiswaan. Lembaga independen tingkat universitas memiliki garis koordinasi dengan lembaga independen di tingkat Fakultas maupun Departemen/Jurusan. Hal ini dapat digunakan untuk sarana kolaborasi dan diskusi mengenai penanganan kasus, sarana pengembangan kompetensi dan kematangan organisasi pada lembaga itu sendiri.

Terdapat kelemahan penerapan *internal whistleblowing* dengan membentuk lembaga independen di kalangan mahasiswa. Kelemahan tersebut adalah *skill* atau kemampuan tim ataupun anggota yang terdapat pada lembaga independen ini. Selain itu, masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang pada umumnya hanya 1 (satu) tahun per periode menjadikan tambahan kelemahan bagi lembaga ini. Maka dari itu, untuk meminimalisir kelemahan ini, penulis menyarankan agar lembaga pengelola *whistleblowing* ini disandingkan atau disatukan dengan pengelola *whistleblowing* di

struktur kampus. Jadi, lembaga pengelola *whistleblowing* di UPI terdiri dari unsur struktural kampus, pembina kemahasiswaan, dan mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian, partisipasi *whistleblowing* dari mahasiswa tidak hanya dapat dilakukan untuk kasus *fraud* yang terjadi di lingkungan organisasi kemahasiswaan tapi juga yang terjadi di lingkungan organisasi kampus dan unsur mahasiswa dapat ikut andil dalam tindak lanjut dari laporan yang masuk ke lembaga tersebut. Hal ini juga sebagai implementasi peran mahasiswa sebagai *social control* di kampus.

Peran ini juga dapat didukung dengan hadirnya unsur mahasiswa dalam keanggotaan Majelis Wali Amanat (MWA). Peran mahasiswa yang hadir di MWA akan menjadi penguat bagi mahasiswa dalam menjalankan tindak lanjut pelaporan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan hadirnya unsur mahasiswa dalam keanggotaan MWA, yang merupakan majelis tertinggi di universitas menjadi jaminan bahwa tindak lanjut laporan yang dilakukan mahasiswa dapat dilaksanakan dan terus diawasi pelaksanaannya.

SIMPULAN

Sebagian besar responden menyatakan perlu adanya *whistleblowing* di organisasi

kemahasiswaan. Hal ini dibuktikan dengan 88% responden dari organisasi tingkat Departemen/Jurusan, 94% responden dari organisasi tingkat Fakultas, dan 91% responden dari organisasi tingkat Universitas menyatakan perlu adanya *whistleblowing*.

Terkait *attitude* anggota organisasi kemahasiswaan terhadap tindakan pelaporan secara umum menunjukkan sikap positif terhadap tindakan pelaporan. Terdapat 9 (sembilan) sub tema yang dominan mengenai sikap anggota organisasi, 5 (lima) diantaranya memberikan sikap positif di mana tindakan pelaporan sangat baik dan memberikan keuntungan bagi organisasi. Namun seluruh responden juga berpendapat bahwa terdapat kerugian dari adanya tindakan pelaporan ini. Responden berpendapat bahwa tindakan pelaporan ini dapat mengancam keharmonisan hubungan pertemanan antar sesama anggota organisasi. Hubungan kekeluargaan, pertemanan, keharmonisan dalam berkomunikasi menjadi modal penting yang harus dijaga oleh organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian faktor *attitude* tidak dominan dalam mendukung niat anggota organisasi kemahasiswaan dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi di organisasi kemahasiswaan.

Secara umum anggota organisasi kemahasiswaan yang menjadi responden penelitian ini memiliki norma-norma subjektif berupa dukungan dari orang terdekat. Dukungan ini didapat dari dua sumber, pertama dukungan dari teman terdekat dan kedua dukungan dari keluarga. Terdapat beberapa responden menyatakan bahwa tidak terdapat dukungan dalam melakukan tindakan pelaporan, walaupun ada yang mendukung mereka adalah kelompok minoritas, yang tentunya tidak akan kuat dalam memberikan dukungan. Dengan demikian faktor *subjective norms* menjadi tidak dominan dalam mendukung niat dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud* pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi di organisasi kemahasiswaan.

Terkait *perceived behavioural control*, responden menilai mudah melakukan

pelaporan jika dilaporkan kepada orang terdekat. Namun terdapat responden yang menilai organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan, karena budaya yang cenderung apatis dan tidak adanya sarana untuk melaporkan. Selain itu, tentu dengan tidak adanya sarana, mekanisme, dan sistem, anggota organisasi kemahasiswaan tidak dapat melakukan tindakan pelaporan dan menindaklanjuti pelaporan dengan baik. Dengan demikian *perceived behavioral control* menjadi tidak dominan untuk mendukung intensi dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud* pada pengelolaan dana organisasi.

Terkait norma-norma moral, keseluruhan responden menyatakan bahwa selaku mahasiswa sudah sepantasnya menjunjung tinggi moral. Selain itu, responden berpendapat bahwa sudah semestinya peraturan ditegakkan dan kejujuran menjadi penting bagi mahasiswa dalam bekerja. Dengan demikian seluruh anggota organisasi kemahasiswaan memiliki *moral norms* yang dominan sehingga mampu mendukung intensi dalam melakukan tindakan pelaporan atas *fraud*.

Keseluruhan responden menyatakan memiliki intensi untuk melakukan tindakan pelaporan. Akan tetapi pelaporan akan dilakukan oleh anggota kemahasiswaan ketika sudah memiliki keyakinan bahwa *fraud* benar terjadi, serta bukti telah didapat.

Terkait model *whistleblowing* yang tepat guna untuk memitigasi *fraud* pada pengelolaan dana organisasi dapat dilakukan dengan pendekatan *internal whistleblowing* yaitu dilakukan dari dan oleh mahasiswa. Disarankan untuk membentuk lembaga independen yang bertugas untuk mengelola *whistleblowing* ini.

Implikasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, organisasi kemahasiswaan dapat mengembangkan model, sistem, dan mekanisme yang dapat dipakai sebagai sarana untuk memitigasi *fraud* pada pengelolaan dana organisasi di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Selain itu Organisasi

kemahasiswaan juga dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi dalam melakukan pelaporan. Sehingga setelah sarana pelaporan tersedia, anggota organisasi dapat diajak dan dimotivasi untuk menggunakannya. Langkah yang dapat dilakukan dengan menghilangkan kekhawatiran anggota mahasiswa yaitu retaknya hubungan pertemanan antar anggota organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat sistem yang dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor tidak tersebar ke publik. Identitas hanya digunakan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, keamanan dari pelapor juga harus dijamin agar memberikan rasanya nyaman dan aman bagi anggota organisasi pasca melakukan pelaporan.

Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan jumlah universitas asal organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini hanya dilakukan di 1 (satu) universitas. Semakin banyak jumlah universitas asal organisasi kemahasiswaan akan semakin memberikan hasil yang lebih representatif. Selain itu penulis tidak meneliti sebab-sebab tindakan *fraud* yang bukan merupakan acuan dari studi ini.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk menyempurnakan penelitian ini, penelitian selanjutnya perlu mengalokasikan waktu yang lebih agar diperoleh lebih banyak responden yang terdiri dari beberapa universitas. Selain itu, responden penelitian dapat ditambah dari unsur pegawai kampus yang bersinggungan dengan organisasi kemahasiswaan. Seperti pembina kemahasiswaan di setiap organisasi, bagian kemahasiswaan di Fakultas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan, hingga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya, penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian dengan menggabungkan kerangka

fraud triangle dengan *Theory of Planned Behavior*.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2010). What Is Fraud? Retrieved from <http://www.acfe.com/fraud-101.aspx>
- Adam, A. A., & Shauki, E. R. (2014). Socially responsible investment in Malaysia: behavioral framework in evaluating investors' decision making process. *Journal of Cleaner Production*, 80, 224–240.
- Agusyani, K. S., Sujana, E., & Wahyuni, M. (2016). Pengaruh whistleblowing system dan kompetensi fraud pada pengelolaan keuangan penerimaan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kabupaten buleleng). Univ Pendidikan Ganesha.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior . *Organizational Behavior and Human Decision Process*(50(2)), (179-211).
- Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York: Open University Press.
- Albrecht, W. S. (2003). *Fraud Examination*. South western: Thomson.
- Alshenqeti, H. (2014). Interviewing as a data collection method: A critical review. *English linguistics research*(3(1)), 39-45.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis In Psychology. *Qualitative Research in Psychology*(3(2)), 77–101.
- Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial Organizational Behaviours. *Academy of Management Review*, 710-725.
- Brown, J. O., Hays, J., & Stuebs Jr, M. T. (2016). Modeling accountant whistleblowing intentions: Applying

- the theory of planned behavior and the fraud triangle. *Accounting and the Public Interest*, 16(1), 28-56.
- Culiberg, B., & Mihelič, K. K. (2016). The Evolution of Whistleblowing Studies: A Critical Review and Research Agenda. *Journal of Business Ethics*, 146(4), 787–803.
- detik. (2019, September 9). tiga dosen unmdidakwa kasus korupsi pengadaan alat lab mipa. Retrieved from news.detik.com:
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2173183/tiga-dosen-unmdidakwa-kasus-korupsi-pengadaan-alat-lab-mipa>
- Ellet, W. (2007). *Case Study Handbook: How to Read, Discuss, and Write Persuasively About Cases*. In *Forum American Bar Association* (Vol. 8). Massachusetts, USA: Harvard Business School Press.
- Fathiyah, Mufidah, & Masnun. (2019). Whistleblowing dan Niat Melaksanakannya Mahasiswa. *Journal of Economics and Business*, pp.150-158.
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. *International Journal of Qualitative Methods*, 80-92.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Massachusetts: Addison-Wesley.
- Gagola, K. (2011). Analisis Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pelaporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. Tesis Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Gao, L., & Brink, A. G. (2017). Whistleblowing studies in accounting research: A review of experimental studies on the determinants of whistleblowing. *Journal of Accounting Literature*, 38, 1-13.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in The Social Sciences*. Massachusetts, United States of America: Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University.
- Gokce, A. (2013). Teachers' value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. *International Journal of Humanities and Social Science*, pp 163–173.
- Handika, M. F., & Sudaryanti, D. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA MELAKUKAN TINDAKAN WHISTLEBLOWING (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI STIE ASIA MALANG). *JIBEKA*, pp 56 -63.
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *ANUVA*, pp 317–324.
- Holloway, I., & Todres, L. (2003). The status of method: flexibility, consistency and coherence. *Qualitative Research*, pp 345–357.
- Hox, J. J., & Boeije, H. R. (2005). Data collection, primary versus secondary. *Indonesia Corruption Watch*. (2016, Desember 6). Korupsi di Perguruan Tinggi. Retrieved Oktober 2019, from Indonesian Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-di-perguruan-tinggi>
- ISOLA POS. (2013). *Skandal Dagang Nilai*. Bandung: ISOLA POS.
- Johnsen, T. B. (2011). Whistleblowing systems in Denmark. *International Data Privacy Law*, 1(3), 199–205.
- Kaiser, F. G., & Scheuthle, H. (2003). Two challenges to a moral extension of the theory of planned behavior: moral norms and just world beliefs in conservatism. *Pers. Individ. Differ.*, 35(5), 1033-1048.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. In *Physical Review B* (2nd ed., Vol. 31).

- Thousand Oaks, California, USA: Sage Publications, Inc.
- Kummer, T.-F. S. (2015). The effectiveness of fraud detection instruments in not-for-profit organizations. *Managerial Auditing Journal*, 30(4/5), pp 435–455. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1083>.
- Kurland, N. B. (1995). Ethical intentions and the theories of reasoned action and planned behavior 1. *J. Appl. Soc. Psychol*, 30, 297-313.
- Latan, H. C., & Lopes, d. (2017). Ethical Awareness, Ethical Judgment and Whistleblowing: A Moderated Mediation Analysis. *Journal of Business Ethics*.
- Lee, G., & Fargher, N. (2013). Companies' Use Whistleblowing to Detect Fraud: An Examination of Corporate Whistleblowing Policies. *Journal Business Ethics*, 283-295.
- Miller, R. L., & Brewer, J. D. (2003). *The A-Z of Social Research*. London: SAGE Publications.
- Naomi, S. (2015). PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN DAMPAKNYA TERHADAP FRAUD. Universitas Lampung.
- Pamungkas, H. K. (2014). ANALISIS BEST PRACTICES WHISTLEBLOWING SYSTEM: USULAN RANCANGAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA BANK INDONESIA. Universitas Indonesia.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The effects of the whistleblowing system on financial statements fraud: Ethical behavior as the mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10), 1592-1598.
- Patten, M. L. (2016). *Questionnaire research: A practical guide*. Routledge.
- Puspitasari, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 133-144.
- Ramadhany, D. M. (2019, September 10). Peran dan Fungsi Mahasiswa. Retrieved from [ub.ac.id: https://blog.ub.ac.id/divamaringga/2017/12/06/peran-fungsi-mahasiswa-pfm/](https://blog.ub.ac.id/divamaringga/2017/12/06/peran-fungsi-mahasiswa-pfm/)
- Republika. (2019, September 9). saut situmorang paparkan modus korupsi di kalangan mahasiswa. Retrieved from [nasional.republika.co.id: https://nasional.republika.co.id/berita/px1z1k384/saut-situmorang-paparkan-modus-korupsi-di-kalangan-mahasiswa](https://nasional.republika.co.id/berita/px1z1k384/saut-situmorang-paparkan-modus-korupsi-di-kalangan-mahasiswa)
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2019, September 10). QUALITATIVE RESEARCH PRACTICE A GUIDE FOR SOCIAL SCIENCE STUDENTS AND RESEARCHERS. Retrieved from [jbposgrado.org: http://jbposgrado.org/icuali/Qualitative-Research-practice.pdf](http://jbposgrado.org/icuali/Qualitative-Research-practice.pdf)
- Rozmita, D. Y., & Nelly, R. N. (2012). GEJALA FRAUD DAN PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM PENDETEKSIAN FRAUD DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (STUDI KUALITATIF). Bandung.
- Sarwono, J. (2006). *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*. CV. Andi.
- Setiawati, L. P., & Sari, M. (2016). Profesionalisme, komitmen organisasi, intensitas moral dan tindakan akuntan melakukan whistleblowing. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, pp 257–282.
- Shauki, E. R. (2018). “Converting Your Master/PhD Thesis into a Journal Article” Handout Case Writing and Methodology. ECAM 809303. Universitas Indonesia.
- Siddiq, F. R., Achyani, F., & Zulfikar. (2017). FRAUD PENTAGON DALAM MENDETEKSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD. Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper.
- Sierra, J. J., & Hyman, M. R. (2008). Ethical Antecedents of Cheating Intentions:

- Evidence of Mediation. *Journal Academic Ethics*, 51-66.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). DETECTING AND TRIANGLE AND SAS NO. 99. Emerald Group Publishing Limited, pp. 53 - 81.
- Smaili, N., & Arroyo, P. (2017). Categorization of Whistleblowers Using the Whistleblowing Triangle. *Journal of Business Ethics*.
- Stake, R. (1995). *The Art of Case Study Research*. London: Sage Publication.
- Suara. (2019, September 9). 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian negara fantastis. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis>
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tirto. (2019, September 9). kasus snp finance upaya menutup celah curang keuangan. Retrieved from tirto.id: (<https://tirto.id/kasus-snp-finance-upaya-menutup-celah-curang-keuangan-cMdD>)
- Tirto. (2019, September 9). KPK terima banyak laporan dugaan korupsi di kampus. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/dHYn>
- PREDICTING FINANCIAL STATEMENT FRAUD: THE EFFECTIVENESS OF THE FRAUD
- Trevino, L. K., & Victor, B. (1992). Peer reporting of unethical behavior: A social context perspective. *Academy of Management Journal*, 35(1), 38–64.
- Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta.: Salemba Empat.
- UPI. (2019). Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia No 3049/UN40/HK/2019 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Wardani, C. A., & Sulhani. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, pp 29-44.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud. *The CPA Journal Online*, 38.
- Yeoh, P. (2014). Whistleblowing: motivations, corporate self- regulation, and the law. *International Journal of Law and Management*, pp 459–474.
- Yin, R. (2003). *Case study research: Design and methods (3rd edition)*. California: Thousands Oaks.